



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA: PILAR ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA

Dr. Muhammad Imanuddin
Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum
Menteri PANRB
Jakarta, 11 November 2020

ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA

TAP MPR Nomor VI/TAP/2001

Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berfikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

1

ETIKA SOSIAL
DAN BUDAYA

2

ETIKA POLITIK
DAN PEMERINTAHAN

3

ETIKA EKONOMI
DAN BISNIS

4

ETIKA PENEGAKAN HUKUM YANG
BERKEADILAN

5

ETIKA KEILMUAN

6

ETIKA LINGKUNGAN



MENGAPA?

- Pelaksana tugas-tugas Pemerintahan
- Simpul Pemersatu Bangsa
- Kelompok Masyarakat Berpengaruh Signifikan



DASAR **HUKUM**

- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.**
- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.**
Jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**



IMAGE PELAYANAN PUBLIK INDONESIA

DAHULU

1. Kasar/tidak sopan
2. Lambat
3. Tidak menguasai pekerjaan
4. Ceroboh
5. Lalai menepati janji/permintaan pengguna layanan
6. Menampakkan kelelahan/kebosanan
7. Diskriminatif
8. Prosedur berbelit-belit



SEKARANG

1. Penampilan menarik
2. Sambutan yang hangat
3. Ramah dan sopan
4. Tidak diskriminatif
5. Menepati janji
6. Cepat dan tepat
7. Prosedur tidak berbelit-belit
8. Peka terhadap kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan ekstra/lebih





KARAKTER

- Loyal (Setia).
- Dedikasi (Mengabdikan).
- Berorientasi Kinerja.
- Melayani.



TANTANGAN

- Teorisme dan Radikalisme
- Korupsi
- Netralitas
- Pandemi Covid-19

DATA PELANGGARAN KODE ETIK & KODE PERILAKU ASN

Sumber Data: KASN (2020) |
Data diperbarui per 8 November 2020

109 ASN
YANG
DILAPORKAN

TOP 10 INSTANSI

1	Kota Bekasi	23 ASN	6	Kabupaten Asahan	4 ASN
2	Kementerian Agama	6 ASN	7	Kota Dumai	3 ASN
3	Kabupaten Bogor	6 ASN	8	Kota Depok	3 ASN
4	Kabupaten Nias Utara	4 ASN	9	Kementerian ATR / BPN	3 ASN
5	Kabupaten Kepulauan Sangihe	4 ASN	10	Kabupaten Karawang	3 ASN

58 ASN
YANG MELANGGAR
DAN MENDAPAT
REKOMENDASI KASN
(53.2%)

TOP 5 JABATAN ASN

1. JPT (24.8%)
2. Kepala Wilayah (22.9%)
(Camat/Lurah)
3. Administrator (15.2%)
4. Fungsional (14.3%)
5. Pengawas (10.5%)

TOP 5 KATEGORI PELANGGARAN

1. Perbuatan Tidak Menyenangkan (26.7%)
2. Perbuatan Sewenang-Wenang (16.8%)
3. Perselingkuhan (14.9%)
4. Masalah Rumah Tangga (12.9%)
5. Perbuatan Tercela (5.9%)

29 ASN
SUDAH DITINDAKLANJUTI
OLEH PPK DENGAN
PENJATUHAN SANKSI
(50.0%)

Tingkat Kepatuhan Instansi
Pemerintah dalam
Penerapan NDKEKP



DATA PELANGGARAN NETRALITAS

Sumber Data: KASN (2020) |
Data diperbarui per 8 November 2020

830 ASN
YANG
DILAPORKAN

619 ASN
YANG MELANGGAR
DAN MENDAPAT
REKOMENDASI
KASN

416 ASN
SUDAH
DITINDAKLANJUTI
OLEH PPK DENGAN
PENJATUHAN SANKSI

TOP 10 INSTANSI

1	Kabupaten Purbalingga	56 ASN
2	Kabupaten Wakatobi	33 ASN
3	Kabupaten Bima	24 ASN
4	Kabupaten Halmahera Selatan	23 ASN
5	Kabupaten Kediri	21 ASN
6	Kabupaten Musi Rawas Utara	19 ASN
7	Kabupaten Sumbawa	18 ASN
8	Kabupaten Halmahera Timur	16 ASN
9	Kabupaten Minahasas Selatan	15 ASN
10	Kota Tomohon	14 ASN

TOP 5 JABATAN ASN

1. Fungsional (25.4%)
2. JPT (23.1%)
3. Administrator (14.5%)
4. Pelaksana (12.8%)
5. Kepala Wilayah (11.4%)
(Camat/Lurah)

TOP 5 KATEGORI PELANGGARAN

1. Kampanye/Sosialisasi Media Sosial (24.2%)
2. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon/bakal calon (14.8%)
3. Melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai calon/bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah (14.2%)
4. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/ calon peserta pilkada (10.9%)
5. Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/ merugikan pasangan calon/bakal calon selama masa kampanye (9.0%)



***PERLU
PENGUATAN
ETIKA ASN***

**TUNTASKAN REFORMASI
BIROKRASI.**

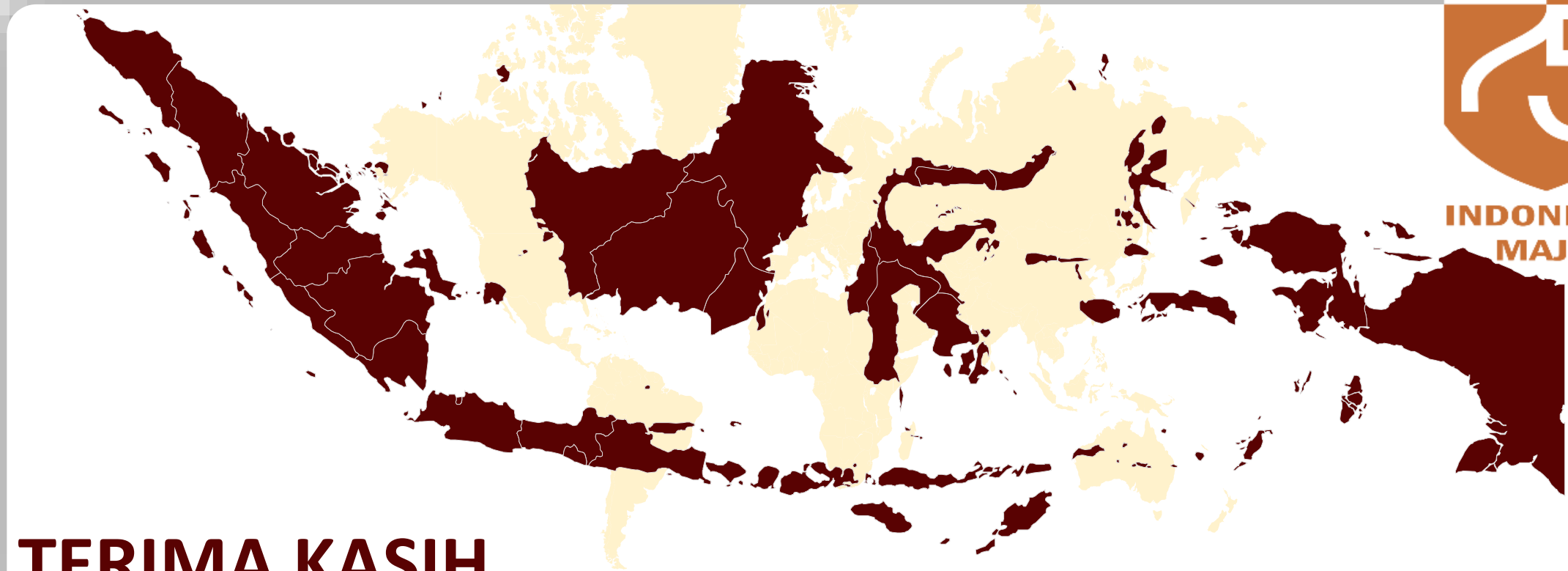
KETELADANAN PIMPINAN

PENEGAKKAN HUKUM

KESEJAHTERAAN ASN



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA



**INDONESIA
MAJU**

TERIMA KASIH



[kempnrb](#)



[kemenpanrb](#)



[Kementerian-PANRB](#)